

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1980.
- Hajati Sri, Winarsi Sri, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2018.
- Harahap, Yahya *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Hidayat, Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Kalalo, Merry, Jemmy Sondakh, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- Madrah T., Dalmaasius, *Adat Sukat Dayak Benuaq dan Tonyooi*, Jakarta, Puspa Swara, 2001.
- Malinckrodt, J., *Het Adatrecht van Borneo*, Leiden, M. Dubbeldeman, 1982.
- Moechthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
- Nurmaningsih Amriani, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nugroho Heru, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001.

- Nugroho Susanti Adi, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Otje Salman Soemadiningrat, H. R., *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni, 2002.
- Perangin Efendi, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, PT Rajawali, 1986.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan Di Indonesia*, Mataram, PT.Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Salindeho Jhon, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Setiyadi, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, CV. Alfabeta, 2011.
- Simon, Fisher, *Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta, The British Council, 2001.
- Siregar, Ansari, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Sumardjono Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2005.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta, Pradnja Paramita, 1997.
- Sofian, *Perbedaan Konflik dan Sengketa*, Jakarta, PT.Pustaka Media, 2015.
- Sutedi Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wiradi Gunawan, 1989, *Agro Industri di Jawa Barat: Konsep permasalahan dan analisa. lokakarya Penelitian Agroindustri*. Bogor. PSP- LP IPB, 1989.

Yulianti, *Penyelesaian Sengketa Perdata*, Bandung, Darma Media, 2011.

### Karya Ilmiah dan Artikel Jurnal

Aksar, A., Dinata, U., Shaleh, A. I., Az-Zahra, F., Ambarwati, A., & Putri, M. "Rekonstruksi penyelesaian sengketa sertipikat ganda pada badan pertanahan nasional". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 2023. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.537-549>

Amahorseya Ronald "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Gandi Indah, Jaya, Nurhayati Darubekti, and Yunilisiah Yunilisiah, "Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum", *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 2, No.11, 2022. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.24721>

Indira Pratiwi Shrimant "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Taman Nasional Tesso Nilo", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Prawira, Suwardhie Sasro, A. Muin Fahmal, and Ahyuni Yunus, "Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi: studi kantor pertanahan kabupaten bantaeng", *Journal of Lex Philosophy (JLP)* (1), 1, 2020. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.23>

Rahmasari, Betha, Ariza Umami, and Tirta Gautama, "Pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa: perspektif normatif", *Muhammadiyah Law Review* (2), 2023. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>

Rumopa Yosua "Konflik lahan Bandara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat", *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2020.

Setitit Margaretha Arfa "Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Mappi Provinsi Papua", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Status dan Wilayah Tanah Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat